

# **BAB I**

## **PENDAHUHAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manajemen risiko terhadap tata kelola dalam suatu organisasi kelembagaan manapun, merupakan faktor penting guna mewujudkan produktifitas organisasi yang sehat. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi modern berpengaruh terhadap persaingan organisasi maupun perusahaan pada umumnya dalam dunia usaha sangat pesat. Hal ini sudah tentu akan berdampak terhadap persaingan yang kompetitif baik dalam dunia usaha atau organisasi, maupun peningkatan mutu pelayanan terhadap konsumennya.

Persaingan dimaksud juga memicu perusahaan atau organisasi untuk mengambil keputusan dengan berbagai cara demi kepentingan organisasi secara efisien dan efektif, jika memiliki pengalaman manajemen risiko yang baik dalam hal berorganisasi secara khusus tata kelola manajemen organisasi. Organisasi yang sehat akan mempertimbangkan secara baik dan teliti setiap keputusan yang diambil, termasuk menghitung nilai risiko baik terhadap manajemen organisasi maupun dampaknya terhadap tujuan organisasi. Menurut Firmansyah, bahwa manajemen risiko itu sendiri adalah sebuah proses atisipatif terutama pada risiko atau kerugian, hal ini menurutnya penting agar kerugian itu sendiri dapat hadapi, dihindari bahkan tidak terjadi kepada organisasi(Firmansyah, 2010).

Tata kelola ornganisasi yang sehat akan melakukan pengendalian risiko sebagai upaya pencegahan guna melindungi organisasi dan konsumennya. Impelentasi tata kelalola manajemen secara khusus di Tingkat struktur dengan baik dengan pemanfaatan manajemen risiko dalam organisasi, juga akan membuat karyawan merasa terlindungi serta risiko terhadap konsumen dapat diminimalisasi. Untuk itu manajemen tata kelola pada lembaga organisasi tidak bisa dianggap sepele, karena merupakan alat

ukur (tools) yang berfungsi sebagai pengendali organisasi, dan berdampak positif terhadap pengungkapan risiko yang akan muncul kemudian.

Organisasi gereja sebagai institusi keagamaan atau lembaga non profit yang independen, kadang tidak bisa membuka diri, dan merasa tidak perlu penerapan sistem tata kelola yang terlalu rumit, dan tidak boleh disamakan dengan perusahaan profit pada umumnya. Banyak pimpinan agama di Indonesia pada umumnya mengembangkan konsep yang salah, dengan berdalil yang penting melaksanakan tugas spiritualitas pelayanan sesuai visi dan misi organisasi agamanya sudah cukup.

Penelitian ini memang bukan soal spiritualitas, namun bila sedikit menyinggung hal ini, dapat dilihat melalui pendapat Pruzan, bahwa keinginan atau Upaya aspek spiritualitas kepemimpinan selalu menunjukkan suatu peningkatan. Namun, hasil dari spiritualitas tersebut tidak ditindaklanjuti atau diterapkan ditingkat operasional. Bahkan menurutnya jika spiritualitas hanya dijadikan obyek kajian atau instrumen dalam sebuah penelitian guna sebuah tujuan yang pragmatis itu sebenarnya sebuah usaha yang sia-sia karena tidak dapat menghasilkan apa-apa. Sebaliknya jika spiritualitas dimaknai sebagai sebuah pengalaman seputar keberadaan realitas yang sangat berharga (metafisik) tentu akan sangat berkontribusi bagi pemimpin dalam memimpin atau pemangku kepentingan (Pruzan Peter, 2015).

Organisasi gereja juga perlu berkontribusi bagi penegakan demokrasi sebagai konsekuensi hidup berbangsa dan bernegara, maka gereja harus menjadi organisasi yang sehat, dengan cara menata dan mengelola manajemen gereja secara baik, dengan sumber daya manusia dan sistem yang baik, sehingga gereja mampu hadir di Tengah-tengah Masyarakat yang majemuk dan berperan inklusif yaitu pelayanan yang terbuka. Dengan SDM yang unggul dan berintegritas, gereja mampu menunjukkan perbedaan gereja dan lembaga lain yang mampu menata pelayanan terhadap umatnya secara baik terutama dalam usaha pembentukan karakter yang merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam upaya menjadi lembaga yang menuntun umat

kepada kebenaran, berkeadilan dan menghadirkan damai dan Sejahtera bagi umatnya.

Gereja sebagai institusi yang tua dan sangat berpengalaman sudah ada bentukan/model yang dipakai baik dan relevan dari masa ke masa yaitu model kepemimpinan yang diadopsi melalui sumber primer yaitu Yesus Kristus sebagai kepala Gereja. Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terus menerus terjadi dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, disinilah poinnya yaitu gereja didesak untuk adaptif, berubah dan mampu menjawab tantangan.

Gereja dalam keyakinannya diutus ke dalam dunia untuk menghadirkan tanda-tanda syalom Allah, namun gereja dihadirkan ke dalam dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Tantangan gereja tentu sangat banyak, karena dunia ciptaan Tuhan yang dihuni oleh manusia penuh dengan konflik, sengketa, kekerasan, dan kehidupan umat yang amoral, dll. Disatu sisi gereja harus menjawab tantangan tersebut, di sisi lain gereja harus merawat umatnya yang menjadi bagian dari komunitas Bersama dalam kehidupan bernegara. Komunitas Bersama ini pun diperhadapkan pada berbagai budaya, ras, tradisi, agama dan lain-lain. Dalam hal ini gereja kemudian tidak sendiri memperjuangkan kebaikan, namun berjejaring dengan gereja lain, bahkan agama lain. Sebagai contoh, kemudian terbangun usaha Bersama melalui moderasi beragama. Moderasi beragama ini di Indonesia dimulai di Tahun 2019, yang usianya terhitung sangat baru. Moderasi beragama hadir sebagai kesadaran bersama terhadap kepentingan peran keagamaan itu sendiri, dan lebih hakiki dari itu adalah karena kesadaran dalam realitas yang sedang berubah.

Mengapa gereja harus turut serta dalam moderasi beragama tentu merupakan pertanyaan yang akan muncul. Mengapa? Karena setiap agama dalam dirinya akan mengklaim bahwa agamanya, imannya dan Tuhannya yang paling benar. Disinilah melalui moderasi beragama setiap keyakinan ini kemudia didialogkan tanpa harus memaksakan untuk kepentingan hidup

sesame anak bangsa (Wildhan Indra Pramono and Adis Imam Munandar, 2020).

Gereja adalah “perkumpulan” atau dalam istilah umumnya organisasi, yang berasal dari kata “ekklesia”. Eklesia atau perkumpulan adalah orang-orang yang dipanggil keluar, sehingga pengertian gereja tidak hanya pada Gedung ibadah, melainkan pada orang sebagai subyek. Karena hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika, perubahan, gesekan, perbedaan persepsi, konflik menjadi bagian dari institusi gereja yang dipanggil keluar. Pada titik inilah manajemen risiko menjadi sebuah keharusan bagi kebaikan Marwah gereja itu sendiri, hal ini perlu dinarasikan mengingat gereja secara universal diidentikan dengan sebuah Gedung. Keterangan yang benar sudah termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1) Gereja adakah gesung (rumah) tempat berdoa dan upacara agama Kristen; 2) Gereja adalah badan (organisasi) umat kristiani yang sama kepercayaan ajaran dan tata cara ibadahnya katolik/protestan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2017).

Dalam lingkup gereja, orang atau manusia itu menjadi kunci utama serta memegang peranan penting guna terbentuknya sebuah institusi lembaga organisasi atau badan yang mengatur kehidupan manusia dan komunitasnya. Mengingat belum adanya penerapan analisis manajemen risiko dalam kepemimpinan atau manajemen gereja, yang disebut dengan *good church governance*, maka organisasi gereja tidak dapat bertumbuh dan membangun dirinya lebih baik.

Tata Kelola manajemen itu sendiri terdiri dari berbagai hal, salah satunya sebagai contoh untuk menjadi perbandingan terhadap tata Kelola manajemen risiko. Menurut Olson, disini yang ditata Kelola adalah data. Dalam sebuah organisasi data sangat diandalkan sebagai sebuah Solusi atas permasalahan kualitas data organisasi (Olson, 2023), dalam pengolahan data organisasi tidak semua data dapat dipakai secara langsung, karena data yang digunakan tentu adalah data yang berkualitas. Yang dimaksud dengan data berkualitas adalah data yang valid, akurat, digunakan tepat waktu, relevan

dengan kebutuhan, lengkap, dan dapat diterima atau dipercaya, memiliki unsur spesifik (Y.W. Lee, L.L. Pipino, J.D. Funk, 2006).

Pemimpin gereja masa kini perlu menyadari bahwa manajemen tata kelola organisasi gereja yang baik berbasis data secara menyeluruh dapat menjawab kebutuhan umatnya. Untuk itu pimpinan gereja perlu menyadari bahwa gaya penerapannya tata kelola organisasi pelayanan yang umumnya konvensional dan terus dipraktekkan di gereja umumnya kelihatan hidup, namun jika dilakukan penelitian lebih mendalam sebenarnya gereja itu mati. Dikatakan mati karena organisasi gereja umumnya memiliki struktur yang baik dan teratur, namun penerapan tata kelola oleh pemimpinnya tidak maksimal dan tidak sesuai SOP organisasi gereja demi tercapainya tujuan.

Berbicara tentang tata kelola organisasi gereja, maka unsur penting yang tidak boleh di lupakan adalah visi gereja itu sendiri. Visi gereja secara universal didefinisikan sebagai gereja yang bertumbuh dan melayani dalam keberagaman, yakni menghadirkan damai di bumi seperti di dalam sorga (doa Yesus), dengan hukum yang pertama dan yang utama yaitu hukum cinta kasih. Dalam implementasinya dalam tradisi kekristenan, dimuat dalam sebuah perintah yang diberikan langsung oleh Yesus Kristus, yang disebut Amanat Agung. Amanat Agung Yesus Kristus berisikan perintah yang mewajibkan semua orang Kristen untuk menduplikasi jumlah murid Yesus. Memuridkan berarti menjadi semua orang yang percaya dan menjadi anggota gereja sebagai orang yang matang, dewasa, beriman, penuh cinta kasih, suka melayani, dll yang sama persis seperti yang dilakukan Yesus semasa hidupnya.

Pemuridan yang diamanatkan Yesus menjadi sebuah visi gereja. Visi gereja tidak bisa diposisikan pada cita-cita yang ideal saja, melainkan wajib dimanifestasikan melalui suatu misi. Misi merupakan penjabaran dari sebuah cita-cita ideal gereja (Visi), maka misi gereja merupakan bentuk riil atau nyata yang langsung berdampak pada manusia sebagai subyek yang dimuridkan. Secara universal misi gereja diberikan nama tripanggilan gereja.

Tri atau tiga panggilan gereja dimaksud adalah Persekutuan atau Bahasa Yunani disebut *Koinoia*, Kesaksian dalam Bahasa Yunani disebut *Marturia* dan Pelayanan Kasih dalam Bahasa Yunani disebut *Diakonia*. Gereja dalam panggilannya harus berfokus pada esensi panggilannya, yaitu pemuridan yang terealisasi dalam usaha oenginjilan (Kejar Hidup Laia, 2019).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa gereja kemudian dalam praktek berorganisasi wajib menjadi murid dan percaya kepada Tuhan, dengan demikian setiap orang yang menjadi organisasi gereja terikat pada pekerjaan yang sama (Listari, L., & Arifianto, 2020). Dalam keterikatan itu gereja wajib memberitakan injil dan memuridkan orang lain yang belum menjadi percaya (bdn. Roma 15:33; 2 Korintus 13:11). Gereja dalam hal ini kemudian memiliki ciri yang membedakan organisasi gereja dengan organisasi di luar gereja, yaitu hadir untuk melaksanakan Amanat Agung Yesus Kristus menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus (bnd. Matius 28:19-20).

Salah satu cara gereja yang taat kepada yang memberikan Amanat Agung yaitu melalui cara mengimplementasikan misi gereja. Mengimplementasikan atau mewujudkan visi melalui misi gereja hanya dapat diorganisir melalui institusi resmi yaitu gereja. Disinilah gereja memperkerjakan orang dalam penataankeloaan organisasi dan mengembangkan system yang memadai untuk memenuhi kualifikasi perwujudan misi gereja.

Misi gereja wajib memiliki sifat yang dinamis karena perkembangan dan perubahan zaman, agar perwujudan misi dimaksud relevan sesuai perubahan (Fredy, 2016). Melalui visi gereja gereja selalu berdoman pada Alkitab sebagai dasar, dan meyakini bahwa seusai Firman Tuhan, perwujudan misi di Tengah-tengah dunia, disertai janji penyertaan-Nya. Artinya setiap orang yang melaksanakan misi Allah, disertai oleh Tuhan, agar perannya di dtengah-tengah dunia membawa damai dan Sejahtera bagi umat yang lain,

dan setiap orang yang melakukan diberikan damai dan Sejahtera-Nya. (Yoh. 14:27).

Karena yang menyelenggarakan misi itu adalah manusia sebagai subyek, maka untuk mewujudkan visi dan misi gereja diperlukan SDM yang memadai dan system tata Kelola yang baik . Untuk mencapai visi dan misi gereja maka secara khusus GKI di Tanah Papua klasis mimika, penulis memilih tema yang sangat dibutuhkan saat ini yaitu “Analisis manajemen tata kelola di Tingkat struktur menengah gereja yaitu Klasis GKI Mimika.

### **1.1.1 Visi, Misi dan Tata Nilai Gereja Kristen Injili di Tanah Papua 2022-2027**

Visi gereja sebelumnya, sebelum Sidang Sinode Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah “Visi Teologia Kerajaan Allah” namun di Tahunan 2022 dalam sidang sinode GKI di Tanah Papua, Visi GKI mengalami perubahan menjadi

*Visi : “Menjadi Gereja Pembawa Keadilan, Kedamaian dan Kesejahteraan.” Guna mewujudkan visi tersebut, maka diperlukan misi GKI yang bersifat manifesto, yaitu : Misi : “Menjalankan Tritugas Panggilan Gereja, dengan Semangat Kebersamaan dan Cinta Kasih.”*

Menjawab tantangan realitas sosial yang dinamis dan berubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan penyederhanaan dari praksis ke prkatis, sehingga diperlukan sebuah tata nilai. Tata nilai bagi GKI di Tanah Papua dianggap sangat startegis untuk memudahkan sosialisasi dan implementasi visi dan misi gereja, maka diperlukan juga tata nilai sebagai berikut; 1) Kesehatan; 2) Ketekunan; 3) Kesetiaan, dan, 4) Ketaatan Iman

### **1.1.2 Visi dan Misi Klasis GKI Mimika**

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Klasis Mimi-Kabupaten Mimika-Propinsi Papua Tengah, mempunyai peran

penting sebagai mitra pemerintah, lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat lainnya. Untuk membangun dan meningkatkan mental spiritualitas umat, sudah tentu membutuhkan manajemen tata kelola yang baik, tertib, teratur dan berkelanjutan.

Untuk itu dalam memainkan peran dan fungsinya sebagai organisasi gereja yang melayani umat, mengacu pada visi sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua sejak tahun 2012 s.d 2036, visi ini merupakan jabaran dari visi induk GKI yaitu : “menjadi gereja pembawa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan, yang diterjemahkan ke dalam konteks GKI Klasis Mimika yang berkedudukan di Kabupaten Mimika, sehingga visi GKI Klasis Mimika disusun untuk kurun waktu samapi 206, yaitu: ”Menjadi teladan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan” (Bnd. 1 Petrus 2 : 21; Efesus 14:16 ; 2 Tim 2, dengan Misinya; 1). Melaksanakan Tugas pemuridan, persekutuan, kesaksian dan pelayanan berdasarkan Alkitab. 2). Mewujudkan cinta kasih dan kebersamaan di kalangan jemaat, masyarakat dan seluruh ciptaanNya. Untuk mencapai visi dan misi dimaksud, maka GKI Klasis Mimika, memiliki tata nilai yang yaitu ; Persekutuan; Kebersamaan; Ketekunan; Kesetiaan; Ketaatan Iman, disingkat (PK4), dengan strategi utama tahun 2012-2026 yang sudah diimplemetasikan sejak tahun 2012 sebagai berikut (Renstra Klasis GKI Mimika, 2022):

1. Tahun 2012 ~ 2016 : Penataan dan pemberdayaan internal
2. Tahun 2016 ~ 2021 : Sinergi manajemen dan kepemimpinan
3. Tahun 2021 ~ 2026 : Mobilisasi internal dan Eksternal
4. Tahun 2026 ~ 2031 : Optimalisasi motivasi pembaruan
5. Tahun 2031 ~ 2036 : Transformasi keteladanan

Untuk menerapkan visi dan misi GKI Klasis Mimika diatas, maka pemimpin struktur gereja, sudah semestinya memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman manajemen tata kelola yang baik dan

**Universitas Kristen Indonesia**

lengkap. Mengingat bahwa organisasi GKI Klasis Mimika memiliki struktur serta visi dan misi yang baik dan lengkap, akan tetapi setelah dilakukan penelitian dan analisis berdasarkan konteks, terlihat dengan jelas bahwa sistem kepemimpinan ditingkat klasis dimaksud, tidak diimbangi dengan penerapan manajemen tata kelola gereja yang baik sesuai uraian tugas yang berlaku dalam gereja. Bila tidak dilakukan pencegahan terhadap sistem kepemimpinan seperti ini, sudah tentu akan berisiko terhadap pelayanan, dan tujuan organisasi yang tidak maksimal. Karena sendiri merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan dan bahkan terjadi disaat tidak diharapkan, karena itu manajemen risiko perlu diterapkan dalam sebuah kesatuan kolektif gereja sebagai institusi dalam pelayanannya yang holistik, sudah pasti diperhadapkan pula dengan berbagai risiko yang kapan saja bisa terjadi dalam gereja itu sendiri, sehingga visi dan misinya tidak terwujud.

## **1.2 Sejarah Terbentuknya Pemerintah Kabupaten Mimika**

Sejarah terbentuknya pemerintah Kabupaten Mimika pada awalnya adalah Badan dari Wilayah Kabupaten Fakfak, yang meliputi 3 (tiga) wilayah pemerintahan kecamatan diantaranya Kecamatan/Distrik Agimuga, Kecamatan/Distrik Mimika Barat dan Kecamatan/Distrik Mimika Timur di wilayah Pemerintah Kabupaten Fakfak. Wilayah ini ditinjau dari perspektif letak geografis dimasa lalu, termasuk daerah yang cukup sulit sebagai akibat dari sulitnya transportasi dan komunikasi sangat terbatas. Oleh karena itu mangacu pada konsep rentang kendali Pemerintah, maka di bentuklah Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:821.26-361, tanggal 3 Agustus 1983.

Sejalan dengan pembentukan lembaga diatas, maka Gubernur Provinsi Irian Jaya menetapkan struktur organisasi Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika berdasarkan Keputusan Nomor : 109/GIJ/1984

tanggal 23 Mei 1984, dengan tugas pokok menyangkut koordinasi, pembinaan, pengawasan di wilayah kerjanya meliputi ketiga Kecamatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Sejak dibentuknya Lembaga Pembantu Bupati Wilayah Mimika pada tahun 1984, telah 3 (tiga) kali terjadi pergantian Pejabat sampai dengan dibentuknya Kabupaten Administratif Mimika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1996. Adapun ketiga Pejabat dimaksud sebagai berikut : Drs. Agustinus Bui, (Tahun 1984 sampai dengan tahun 1992), Ismael Samali Bauw, (Tahun 1992 sampai dengan tahun 1995) dan Drs. Husein Usman (Tahun 1995 sampai dengan tahun 1996).

Kabupaten Administratif Mimika dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1996, peresmiannya dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 8 Oktober 1996, sekaligus dilantik Bupati Mimika yang pertama adalah Drs. Titus O. Potereyauw dan pada tanggal 21 bulan Desember tahun 1996, kemudia yang dilantik menjadi Sekretaris daerah pada saat yang sama adalah A.Alli Rafra, SJ. Keduanya menjabat sebagai Bupati dan sekretaris daerah Mimika yang pertama.

Dengan telah ditetapkannya Kabupaten Administratif Mimika, selanjutnya melalui Menteri Dalam Negeri ditetapkan Keputusan Nomor: 176 Tahun 1996, tanggal 4 Oktober 1996 tentang Struktur dan tata laksana kerja pemerintahan di lingkungan Sekretaris Daerah di atas, ddengan membentuk 6 (enam) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), yaitu : Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian; Dinas LLAJ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, Kabupaten Administratif Mimika mengalami perubahan status pemerintahan menjadi Kabupaten dengan status baru yaitu “Otonom” sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 45 tahun 1999, tanggal 4

Okteober 1999, dan kemudian daerah pemerintan Mimika diresmikan di Jakarta pada tanggal 12 Okteober 1999, bersamaan dengan dilantiknya Drs. Titus O. Poterayauw sebagai Bupati Kabupaten Mimika.

Sebagai konsekuensi dari Daerah Otonom, diharuskan untuk membentuk DPRD Kabupaten Mimika sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Mimika, maka berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 telah ditetapkan keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika periode 2000 sampai dengan 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor : 1 Tahun 2001 , tanggal 2 Januari 2001 dan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2001.

Dengan telah dibentuknya DPRD Kabupaten Mimika, salah satu tugas dan fungsi DPRD adalah memilih kepala Daerah. Pemilihan yang dilakukan oleh DPRD Mimika pada saat itu adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2001 s.d 2005. Maka pada bulan September 2001 diadakan pemilihan oleh Panitia Pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Mimika, dan pada pemilihan periode dimaksud, terpilih Klemens Tinal sebagai Bupati dan Methodius Mamapuku sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika. Setelah melalui semua tahapan, maka pasangan yang menang tersebut dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 14 Desember 2001.

Mengawali fungsinya sebagai Bupati Kabupaten Mimika, maka bersama DPRD Kabupaten Mimika telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah. Tiga diantaranya adalah Peraturan Daerah mengenai Kelembagaan dan Perangkat Daerahn pada tahun 2001, yaitu Peraturna Daeran (Perda) No.2 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Peraturan Daerah berikutnya sebagai Kabupaten Administratig yang baru adalah Perda No.3 tahun 2001 adalah tentang struktur dan tata laksana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika. Peraturan berikutnya adalah Perda No.4 Tahun 2001 yaitu tentang struktur organisasi

**Universitas Kristen Indonesia**

dan tata laksana kerja Dinas Daerah Kabupaten Mimika, dan Perda yang terakhir adalah Perda No.5 Tahun 2001 tentang struktur dan tata laksana kerja organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Mimika.

Dalam perkembangan selanjutnya, Perangkat Daerah Kabupaten Mimika mengalami perubahan dengan ditetapkan yaitu melalui Perda No.2 Tahun 2002 Tentang Struktur dan Tata Laksana Kerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Peraturan Daerah No: 3 pada Tahun yang sama Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika dan kemudian Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Struktur Tata Kerja orgasnisi Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Mimika dan yang terakhir yaitu Perda No.5 Tahun 2001 yang memuat tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Mimika.

Menyadari betapa kompleksnya tugas-tugas serta tanggung jawab pelayanan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, maka merupakan kewenangan Pemerintah daerah untuk membentuk Unit atau Badan yang khusus menangani tugas pelaksanaan pengelolaan barang untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mimika. Tugas pelaksanaan pengelolaan ini mencakup: Perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, penghapusan dan investasi.

Atas dasar pertimbangan dimaksud maka Pemerintah Daerah kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No.30 Tahun 1976 sehingga untuk Daerah Kabupaten Mimika peraturan pelaksanaannya berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2003 Kabupaten Mimika, tentang Oragnisasi dan tata Laksana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika yang didalamnya sudah terakomodir Badan Badan Pengelolaan Barang Daerah.

Peran Badan Pengelolaan Barang sangat penting bagi Pemerintah Daerah. Dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah ini, maka tugas dan fungsi yang melekat dengan OPD tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan barang daerah;
- b. Melaksanakan Tugas Administrasi yang berkaitan dengan pengolahan, perawatan, penghapusan, Analisa kebutuhan, penetapan nilai kekayaan dan tertib administrasi barang daerah.
- c. Melaksanakan Pembinaan dan petunjuk teknis pemberdayaan
- d. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.

### **1.3 Sejarah Terbentuknya GKI Klasis Mimika**

GKI Klasis Mimika merupakan salah satu klasis GKI yang relatif masih muda usianya. Klasis ini baru ditetapkan kemandiriannya pada tahun 1992, melalui Sidang Sinode ke-XIII tahun 1992 di Serui. Klasis ini sudah memiliki 38 sentra-pelayanan, yang terdiri atas 46 jemaat mandiri, ditambah 3 pos persiapan jemaat. Satu keunikan tersendiri dari GKI Klasis Mimika adalah keadaan warga jemaatnya yang hampir sepenuhnya merupakan kaum pendatang di seluruh nusantara, baik dari dalam maupun luar wilayah Papua.

Hadirnya PT. Freeport di wilayah Mimika pada tahun 1973 membawa dampak yang besar, termasuk pertumbuhan gereja bagi wilayah ini melalui masuknya warga migran dari luar, dengan kepentingan tentunya untuk mendapat manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan asing ini. Hal ini berdampak pula terhadap upaya pemerintahan mulai ditata dari desa sampai pada tingkat kabupaten, dan tentunya berdampak terhadap penempatan pegawai di tingkat distrik dan kabupaten dan bermukim di daerah timika dan sekitarnya sebagai penduduk yang menetap bersama dengan para pekerja dan karyawan.

Dari latar budaya masyarakat, ada penduduk yang beragama kristen protestan dari gereja luar, yang seazas dengan GKI di Tanah Papua, dan bergabung sebagai warga GKI dan beribadah secara teratur. Mereka inilah yang merupakan embrio atau cikal-bakal terbentuk dan berkembangnya jemaat-jemaat GKI di Kabupaten Mimika. Berikut adalah perkembangan GKI Klasis Mimika menurut periodisasi sebagai berikut (GKI Mimika, 2012) :

#### 1. Periode Tahun 1986-1992

Kehadiran penduduk dari berbagai daerah asal di Indonesia migrasi masuk ke Mimika karena faktor Tambang Emas PT. Freeport, turut membawa dampak positif bagi hadirnya GKI di Mimika. Karena wilayah dataran Rendah Mimika, sejak zaman zendeling merupakan wilayah pelayanan Agama-agama Katolik, dan protestan lainnya seperti GIDI, Kemah Injil dll, sedang Jemat-jemaat GKI di Klasis Mimika terbentuk karena faktor migrasi masuk. Tahun 1986 jemaat-jemaat GKI yang telah terbentuk dan mendapatkan pelayanan oleh Klasis GKI Fakfak adalah: Jemaat GKI Imanuel Kokonao, Jemaat GKI Solafide Mapurujaya. Dua jemaat ini merupakan jemaat-jemaat kategorial/ ditangani langsung oleh Sinode GKI, dan merupakan cikal bakal terbentuknya GKI di Kabupaten Mimika sampai sekarang.

#### 2. Periode Tahun 1992 – 1997

Periode ini merupakan masa berdirinya klasis GKI Mimika setelah empat tahun masa bakal-klasis. Badan Pekerja Bakal Klasis GKI Mimika terus membenahi diri dan mengatur pelayanan sehingga terus terjadi perkembangan dalam pelayanan sebagai bagian dari kebutuhan membangun spiritualitas umat yang mendapat perhatian penuh dari pimpinan GKI sampai dengan didirikannya menjadi organisasi GKI yang definitive di Mimika. Perubahan-perubahan seperti penambahan warga baru, yang pada akhirnya mendorong berdirinya jemaat-jemaat GKI yang

lainnya, memacu Badan Pekerja Bakal Klasis Mimika berusaha mempersiapkan segala hal sesuatu yang disyaratkan bagi penetapan sebuah klasis. Pada Sidang Sinode XII Tahun 1992 di Serui ditetapkanlah pemberian status menjadi klasis penuh bagi wilayah Mimika.

### 3. Periode 2001-2006

Sidang Klasis III berlangsung di Jemaat GKI Marten Luther Sempan tanggal 25-28 Maret 2001. Ketua Klasis terpilih pada periode ini ialah Pdt. Matheus Adadikam, STh. Dalam periode ini GKI melakukan pembenahan internal dan berhasil melakukan pemekaran terhadap 3 jemaat baru dan membangun 3 unit pastori klasis serta lahan-lahan tanah yang bagi rencana pengembangan GKI kedepan.

### 4. Periode 2006-2012

Sidang IV Klasis Mimika berlangsung di jemaat GKI Maranatha SP3 (Karang Senang), yang memilih kembali Pdt. M. Adadikam sebagai ketua Klasis GKI Mimika. Pada periode ini ada rekomendasi tugas belajar untuk 3 tenaga pelayan ke jenjang S1 Teologi di Abepura. Selain itu, BP Klasis berhasil menyelesaikan pembangunan 20 ruang belajar YPK di Kabupaten Mimika.

### 5. Periode 2012-2017

Sidang V Klasis GKI Mimika diselenggarakan di Jemaat Betlehem Kuala Kecana pada tanggal 29 – 31 Maret 2012. BPK periode V ini diketuai Pdt. Daniel Joseph Kaigere, S.Si. Banyak harapan diletakkan ke atas pundak pengurus baru Klasis. Pada periode inilah pimpinan klasis mulai melakukan upaya terkait penerapan tata kelola bersama pihak yang memiliki kompetensi Menyusun dan menetapkan visi pelayanan untuk 25 tahun ke depan (2012-2037).

## 6. Periode 2017-2022

Periode ini, merupakan periode ke-VI, dan melalui Sidang VI Klasis GKI Mimika yang diselenggarakan di Jemaat GKI Betlehem Kuala Kecana di Gedung Multi Purpose, pada tanggal 19-21 April 2017, telah memilih Pdt Lewi Sawor, STh, M. Mis sebagai Ketua Klasis GKI Mimika, periode 2017-2022. Sebagaimana banyak harapan jemaat-jemaat diletakkan ke atas pundak periode sebelumnya. Demikian halnya harapan itu diletakkan ke atas pundak kami. Komitmen ini tetap berorientasi pada keputusan dan ketetapan Sidang VI Klasis Mimika, dan implementasinya dengan mengacu pada Renstra Klasis Mimika pada strategi kedua, yaitu sinergi manajemen dan kepemimpinan yang berorientasi kepada klasis dan jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan GKI Klasis Mimika. (GKI Mimika, 2012).

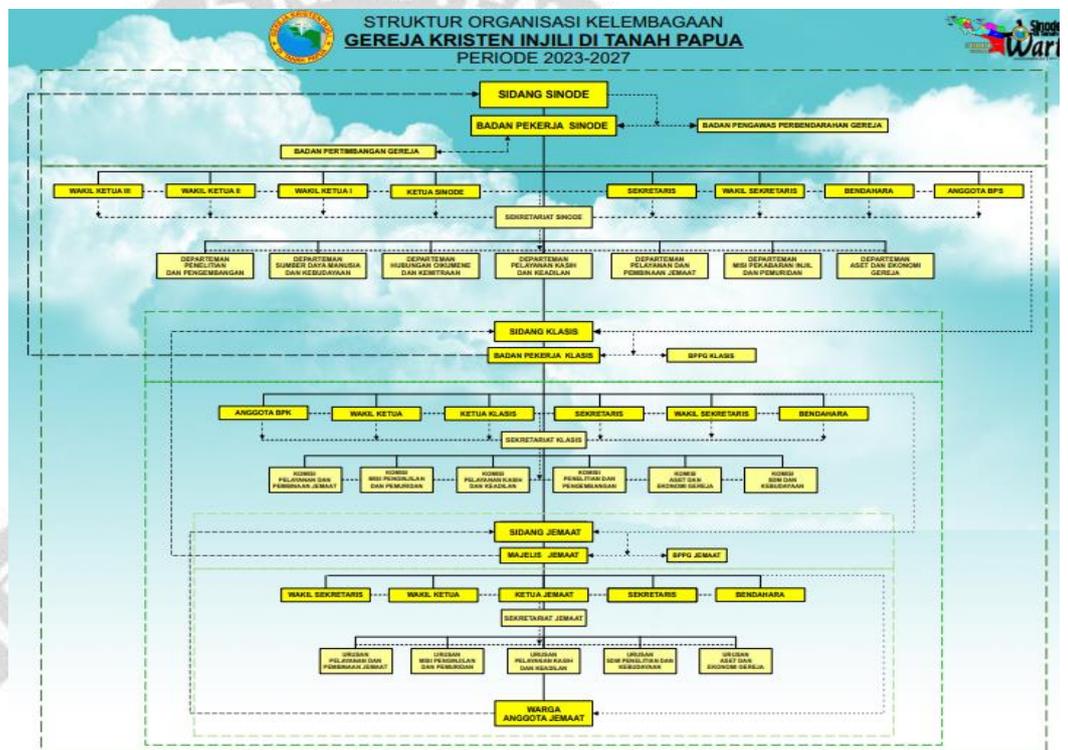
### 1.3.1 Struktur Organisasi Klasis GKI Mimika

Gereja Kristen Injili adalah gereja yang berbentuk sinode, sehingga yang dimaksud dengan sinode adalah kumpulan jemaat-jemaat. Prinsip gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah Presbiterial Sinodal. Presbiter adalah Penatua, yaitu Pekerja Gereja dari Kaum Awam yang dipilih dalam sidang jemaat menjadi penilik jemaat. Biasanya presbiter atau penatua bertugas selama 5 Tahun. Karena wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua yang begitu luas, maka dibutuhkan organisasi di Tingkat Middle yang dikenal dengan nama Klasis. Klasis sendiri merupakan penghimpunan jemaat-jemaat. Struktur GKI di Tanah Papua sendiri sifatnya Terstruktur, berjenjang dan meluas, sehingga mampu memperpendek rentang kendala yang dihadapi oleh Jemaat-Jemaat.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa struktur GKI di Tanah Papua tidak dapat dipisahkan dari level Jemaat-Klasis-Sinode, semuanya merupakan satu kesatuan yang berhubungan satu

dengan yang lainnya seperti tampak dalam struktur Organisasi GKI di Tanah Papua di bawah ini:

*Gambar : Bagang Struktur Kerja GKI Di Tanah Papua*



Sesuai hasil penelitian tentang Analisis Manajemen Risiko Terhadap Tata Kelola Gereja GKI Klasis Mimika, maka dipandang perlu memberikan gambaran umum tentang Struktur Badan Pekerja GKI Klasis Mimika aktif terpilih periode 2022-2027, pada Sidang VII Klasis Mimika, tanggal 16 September 2022 di Jemaat GKI Syalom Amungsa Timika, dengan Ketetapan Sidang Klasis Mimika Nomor:16/TAP/SK.VII-MMK/IX/2022, sebagai berikut (Hasil Ketetapan Sidang VII Klasis Mimika, 2022):

1. Ketua Badan Pekerja Klasis Mimika
2. Wakil Ketua Badan Pekerja Klasis Mimika
3. Sekretaris Badan Pekerja Klasis Mimika
4. Wakil Sekretaris Badan Pekerja Klasis Mimika
5. Bendahara Badan Pekerja Klasis Mimika

Selain Badan Pekerja Harian GKI Klasis Mimika diatas, ada pula anggota wilayah I-IV; sebagai pelaksana tugas dan tata kelola pelayanan di wilayah sebagai representasi dari badan sesuai strukturnya sebagai berikut:

1. Anggota Badan Pekerja Klasis Mimika Wilayah 1
2. Anggota Badan Pekerja Klasis Mimika Wilayah II
3. Anggota Badan Pekerja Klasis Mimika Wilayah III
4. Anggota Badan Pekerja Klasis Mimika Wilayah IV

GKI Klasis Mimika dari sisi finansial mampu membiayai pegawai dan program pelayanan, dengan menerapkan sistim pengelolaan keuangan secara sentral berdasarkan Peraturan GKI di Tanah Papua Bab V Tentang Uraian Tugas Badan Pekerja Klasis, bagian ketiga, Pasal 22 yang mengatur tentang pengawasan terhadap keuangan di tingkat Jemaat, Klasis dan Sinode sesuai Peraturan GKI di Tanah Papua (GKI Tanah Papua, 2022).

### **1.3.2 Masa Jabatan Badan Pekerja Klasis;**

Masa Jabatan Struktur Badan Pekerja Klasis GKI di Tanah Papua, adalah 5 Tahun. Masa Jabatan ini diatur dalam Tata Gereja GKI di Tanah Papua, Bab X Tentang Klasis; pasal, 29, sebagai berikut; (GKI Tanah Papua, 2022).

Masa perodesasi Badan Pekerja Klasis, pada satu sisi, hal itu menguntungkan karena adanya proses regenerasi dalam organisasi. Akan tetapi disisi lain ada kelemahannya, karena setiap pemimpin yang telah terpilih, tidak semua memiliki kompetensi dan kemampuan SDM yang sama. Sehingga dalam pelaksanaan tugas maupun kebijakan yang dilakukan dalam menata dan mengelola organisasi seringkali menyimpan dari tujuan organisasi.

### **1.3.3 Perangkat Kerja Struktur Organisasi BP Klasis GKI Mimika**

Perangkat kerja organisasi ini dalam struktur GKI disebut Sekretaris Komisi dan dapat melaksanakan tugas di Tingkat Klasis yang berkedudukan di kabupaten atau kota dan distrik. Sekretaris Komisi terdiri dari satu orang, dan ditambah dengan satu atau dua orang anggota sesuai kebutuhan.

Sekretaris komisi dimaksud, dipilih dan diangkat oleh BP Klasis Mimika periode berjalan sesuai peraturan yang berlaku dalam organisasi sebagai pelaksana teknis program pelayanan gereja bersama Badan Pekerja Klasis GKI Mimika, periode 2022-2027, selama lima tahun. Adapun urutan sekretaris komisi dimaksud sebagai berikut :

1. Sekretaris Komisi : Misi, Penginjilan, Pemuridan dan Kemitraan (MP2K)
2. Sekretaris Komisi : Pelayanan dan Pembinaan Jemaat (P2J)
3. Sekretaris Komisi : Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan (SDMK)
4. Sekretaris Komisi : Pelayanan Kasih dan Keadilan (PKK)
5. Sekretaris Komisi : Aset dan Ekonomi Gereja (AED)

## 6. Sekretaris Komisi : Penelitian dan Pengembangan

Sekretaris Komisi sebagaimana disebutkan diatas, bukan Pegawai Organik GKI. Sekretaris Komisi dimaksud, ditunjuk oleh Badan Pekerja Klasis, dan mengikuti masa perodesasi 5 tahun. Mereka rata-rata berasal dari warga gereja (kaum awam) yang tidak memiliki jabatan dalam gereja. Mereka juga memiliki pekerjaan pokok dengan tugas dan profesi yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sebagai sekretaris komisi sangat kelihatan hanya menjadi pekerjaan sampingan saja.

### 1.3.4 Tugas-Tugas Sekretaris Komisi Klasis Mimika

Berdasarkan Peraturan GKI di Tanah Papua, tentang tugas Komisi di Tingkat Klasis, Bab V tentang Jabatan Struktur dan Alat Kelengkapan, diatur pada Tata Gereja dan Peraturan GKI di Tanah Papua, pasal 23-28 tentang uraian tugas komisi-komisi di tingkat klasis, sejalan dengan kepemimpinan BP Klasis (GKI Tanah Papua, 2022):

Tugas-tugas komisi di tingkat klasis sebagaimana sesuai uraian tugasnya, jika dibandingkan dengan status pelaksana tugas yang bukan sebagai Pegawai Organik Gereja (POG), nampaknya sangat tidak mungkin maksimal. Dari kondisi ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa, gereja belum mampu menerapkan sistim manajemen risiko dan tata kelola yang baik dan berkelanjutan dalam struktur gereja karena masalah SDM yang sangat terbatas.

### 1.3.5 Koordinator Seksi Unsur Klasis Mimika

Koordinator seksi unsur merupakan perangkat kerja organisasi di bawah tanggungjawab Komisi Pelayanan dan Pengajaran terhadap warga jemaat sesuai pengelompokan atau batasan usia dan status maka Tata Gereja GKI Tahun 2022 telah

**Universitas Kristen Indonesia**

dengan sangat jelas mengatur pengelompokan/Batasan usia dimaksud.

Koordinator Seksi dimaksud, dipilih dan diangkat oleh BP Klasis Mimika periode berjalan sesuai peraturan yang berlaku dalam organisasi sebagai pelaksana teknis program pelayanan gereja di tingkat unsur jemaat bersama KP2J pada periodisasi berjalan, selama lima tahun.

Koordinator seksi tersebut, membentuk kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari beberapa orang sesuai kebutuhan pelayanan seksi di masing-masing unsur. Adapun urutan koordinator seksi dimaksud sebagai berikut (Tata Gereja & Peraturan-Peraturan Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua, 2022) :

1. Koordinator Seksi : Persekutuan Anak dan Remaja Sekolah Minggu (PAR)
2. Koordinator Seksi : Persekutua Anggota Muda (PAM)
3. Koordinator Seksi : Persekutua Kaum Wanita (PKW)
4. Koordinator Seksi : Persekutua Kaum Bapak (PKB)

Tugas koordinator seksi unsur di tingkat klasis sebagaimana diuraikan diatas, melaksanakan tugas spesifik sebagai representasi dari KP2J dan memainkan peran sebagai sentra penghubung program pelayanan dan pengajaran antar Badan Pelayan Unsur di tingkat jemaat-jemaat se klasis mimika.

Dalam pelaksanaan tugas, koordinator seksi memainkan peran yang sangat penting sebagai sentra penghubung dar BP Klasis Mimika, secara khusus terkait program pelayanan terpadu yang sasarannya kepada masing-masing unsur jemaat, dan pelaksanaannya adalah KP2J bersama BP Unsur Jemaat. (Tata Gereja & Peraturan-Peraturan Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua, 2022);

Tugas-tugas koordinator seksi di tingkat klasis sebagaimana dijelaskan diatas, juga adalah warga gereja yang ditunjuk untuk pelaksana tugas, dan mereka bukan sebagai Pegawai

Organik Gereja (POG) GKI. Mereka lebih tepatnya disebut sebagai aktifis gereja yang setia dalam tugas. Namun hampir mengalami situasi dan kondisi yang sama/mirip dengan sekretaris komisi, yang nampaknya tidak maksimal melaksanakan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa sistim manajemen risiko dan tata kelola yang baik belum diterapkan dalam gereja.

### **1.3.6 Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja (BPPG) Klasis**

#### **Mimika**

Tata Gereja gereja dan Peraturan GKI juga mengatur secara khusus mengenai Perbendaharaan dan Pengawasan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. BPPG adalah salah satu lembaga pangawasan perbendaharaan gereja yang berkedudukan di tingkat klasis. Atas dasar itu, maka sesuai Peraturan BPPG Bab X, pasal 27 tentang susunan organisasi, maka dilingkup klasis, pada Sidang Klasis Mimika, tanggal 16 September 2022 telah terpilih struktur BPPG periode 2022-2027 sebagai berikut(BPPG-GKI, 2022):

1. Ketua BPPG Klasis GKI Mimika
2. Wakil Ketua BPPG Klasis GKI Mimika
3. Sekretaris BPPG Klasis GKI Mimika
4. Anggota BPPG terdiri dari 5 orang

Berdasarkan Peraturan BPPG Bab X, pasal 24 mengatur tentang kedudukan BPPG sebagai Lembaga Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan perbendaharaan gereja, khusus di klasis, berkedudukan di klasis. (GKI Tanah Papua, 2022) :

Tugas BPPG sebagaimana diuraikan diatas, memegang peranan penting sebagai pengawas dalam pelayanan gereja, secara khusus terkait masalah tata kelola keuangan gereja untuk kepentingan pelyanan. Anggota BPPG dimaksud, adalah warga gereja yang memiliki kemampuan dibidang keuangan, dan

**Universitas Kristen Indonesia**

kebanyakan mereka adalah pegawai negeri dan pengusaha yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola keuangan. Mereka juga bukan Pegawai Organik Gereja (POG) GKI. Mereka juga mengalami situasi dan kondisi yang sama/mirip dengan lainnya, yang tidak maksimal melaksanakan tugas, karena mempunyai tugas ganda/ tugas pokok sehingga waktu terbatas untuk melakukan tugas pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksana tugas tata kelola keuangan tidak maksimal.

#### **1.4 Permasalahan**

Adapun permasalahan berdasarkan analisis risiko manajemen tata kelola, maka hal ini menjadi isu penting dalam penelitian ini. Penting karena sebagai organisasi pada umumnya selalu diperhadapkan pada berbagai masalah internal maupun eksternal, sehingga pemanfaatan dan penerapan manajemen yang baik akan membantu organisasi gereja menjadi organisasi yang sehat dalam pertumbuhannya. Lingkup tugas pelayanan GKI klasis Mimika terkait dengan manajemen penerapan struktur dan tata kelola, diperhadapkan dengan permasalahan yang umumnya terjadi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan manajemen sesuai struktur dan tata kelola berdasarkan pelaksanaan tugas serta fungsi sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Tata Gereja dan Peraturan tentang struktur dan tata kelola GKI di Tanah Papua.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola serta tugas dan tanggungjawab pelayanan berdasarkan pedoman pelayanan GKI di Tanah Papua.
3. Kapasitas sumber daya manusia tidak memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penerapan struktur dan tata kelola di GKI Klasis Mimika.
4. Belum optimalnya fungsi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi dan komunikasi internal yang intens terhadap perangkat kerja struktur dan tata kelola lainnya yang perlu dioptimalkan

5. Belum adanya penerapan dan pemanfaatan manajemen risiko secara khusus pada penerapan program kerja sangat berpengaruh pada capaian yang kurang optimal atau belum efektif dan akuntabel.
6. Dari segi pengendalian dan capaian kinerja dan indikator penilaian terhadap perangkat struktur dan tata kelola gereja yang akuntabel.
7. Koordinasi lintas lembaga agama dan kemitraan dengan pemerintahan daerah dan organisasi kemasyarakatan lainnya belum optimal.

Bertolak dari beberapa permasalahan umum penerapan manajemen tata kelola di GKI Klasis Mimika diatas, maka dapat dirumuskan bahwa; tentu permasalahan umum yang dihadapi adalah, bahwa penerapan tata kelola dalam gereja belum dilakukan secara komprehensif dan berbasis manajemen risiko. Selain itu manajemen yang baik sesuai SOP yang berlaku di GKI Klasis. Untuk itu penerapan manajemen tata kelola gereja perlu didukung dengan berbagai alternatif kebijakan yang inovatif, terutama oleh pemangku kepentingan dalam struktur, sekaligus sebagai pelaksana tugas tata kelola organisasi, agar tujuan pelayanan gereja tercapai.

### **1.5 Rumusan Masalah**

Bersadarkan deskripsi pada latar belakang masalah, diperoleh 3 pertanyaan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memanfaatkan dan memberlakukan manajemen risiko dalam organisasi gereja secara khusus dalam hal penatakelolaan terhadap struktur organisasi di klasis GKI mimika?
2. Bagaimana menerapkan strategi manajemen risiko dalam struktur dan tata kelola organisasi GKI Klasis Mimika?
3. Bagaimana melakukan mitigasi terhadap pelaksanaan tugas tata struktur dan tata kelola pada organisasi klasis GKI Mimika propinsi Papua Tengah?

## **1.6 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah, sehingga yang menjadi tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Mengembangkan dan menerapkan manajemen risiko dalam organisasi gereja secara khusus dalam hal penatakelolaan terhadap struktur organisasi di klasis GKI mimika?
2. Menerapkan strategi manajemen risiko dalam struktur dan tata kelola organisasi GKI Klasis Mimika
3. Melakukan mitigasi terhadap pelaksanaan tugas tata struktur dan tata kelola pada organisasi klasis GKI Mimika propinsi Papua Tengah

## **1.7 Manfaat Penelitian**

### **1.7.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bukan hanya di tataran praksis, melainkan praktis atau operasional, sehingga manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1.1. Menjadi sebuah terobosan baru bagi organisasi gereja dengan menerapkan manajemen risiko dalam struktur dan tata kelola yang baik sesuai kebutuhan organisasi GKI Klasis Mimika, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah;
- 1.2. Mengetahui risiko yang mempengaruhi penatakelolaan di tingkat struktur gereja, yang berdampak buruk bagi pertumbuhan gereja GKI Klasis Mimika, Kabupaten Mimika, dan mencari alternatif pemecahannya;
- 1.3. Membantu menata dan mengelola risiko yang berpotensi muncul dalam organisasi gereja dan secara system mampu membangun dan strategi yang jitu, melalui penerapan manajemen risiko di tingkat struktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi GKI Klasis Mimika, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.

- 1.4. Agar penerapan manajemen risiko terhadap struktur dan tata kelola organisasi GKI Klasis Mimika di Kabupaten Mimika, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah, berdampak terhadap kemajuan gereja demi tercapainya tujuan.

### **1.7.2 Manfaat Teoritis;**

Selain manfaat praktis penelitian ini juga menjadi penelitian yang turut berkontribusi secara teoritis. dari segi teoritis, sehingga manfaat teoritis penelitian ini meliputi:

- 1.1. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi dunia akademisi secara khusus bagi tata kelola organisasi gereja sehingga sumbangsi penelitian ini dapat berguna secara luas, baik secara substansi materinya, informasinya, modelnya bagi pengelolaan gereja secara umum.
- 1.2. Memperkaya dan menambah wawasan penulis, dalam penelitian terkait analisis risiko dan manajemen tata kelola gereja, sebagai tugas akhir pada Universitas Kristen Indonesia-Jakarta.
- 1.3. Bagi peneliti sejatinya dapat menjadi bahan kritikan, atau model dan acuan bagi penelitian lanjutan.

### **1.7.3 Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan secara ilmiah melalui Teknik wawancara, dan pengisian kusioner, sebagai pilihan/cara untuk mengumpulkan informasi, keyakinan, pendapat, perilaku atau penerapan manajemen risiko dalam penatakelolaan organisasi gereja. Setelah mengumpulkan data melalui tehnik di atas, kemudian dilakukan Upaya konfirmasi dan rekonfirmasi dengan dokumen tertulis.

Selebihnya berhubungan dengan narasumber, penulis mengelompokan dalam 3 kategori. Tiga kategori ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, antara lain:

- 1) Pimpinan Badan Pekerja Klasis Mimika;
- 2) Pimpinan Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja (BPPG)
- 3) Selain terhadap struktur di atas, juga sebagai pembanding dilakukan terhadap stakeholder yang rata-rata berasal dari mantan pimpinan pada periodisasi sebelumnya.

## **1.8 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup yang menjadi subjek penelitian dalam tulisan ini, telah diuraikan pada kerangka pemikiran diatas, khususnya terkait dengan analisis manajemen risiko terhadap struktur dan tata kelola pada organisasi gereja. Untuk itu, penulis telah melakukan penelitian pada Gereja Kristen Injili Tanah Papua, khususnya di Klasis Mimika, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.

## **1.9 Sitematikan Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Sejarah Terbentuknya Pemerintah Kab. Mimika
- 1.3 Sejarah Terbentuknya GKI Klasis Mimika
- 1.4 Permasalahan
- 1.5 Rumusan Masalah
- 1.6 Tujuan Penelitian
- 1.7 Manfaat Penelitian
- 1.8 Ruang Lingkup Penelitian
- 1.9 Sistematika Penulisan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- 2.1 Prinsip Tata Kelola
- 2.2 Pentingnya Sumber Daya Manusia
- 2.3 Tinjauan Pustaka

### **BAB III METODOLOGI PENULISAN**

- 3.1 Pendahuluan
- 3.2 Metode penelitian terapan (applied research)
- 3.3 Lokasi dan waktu penelitian
- 3.4 Pengumpulan Data
- 3.5 Variabel penelitian

- 3.6 Teknik Pengumpulan Data
- 3.7 Studi Pustaka
- 3.8 Teknik analisis data
- 3.9 Penerapan Tata Kelola sesuai Strukturnya

#### **BAB IV ANALIS DAN PEMBAHASAN**

- 4.1 Manajemen risiko
- 4.2 *Fishbone Analysis*

#### **BAB V PENUTUP**

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Implikasi Teoritis
- 5.3 Saran

